

MARET 2023



LAPORAN

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Pemerintah Kota Binjai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022.

Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Binjai yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022. Penyusunan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Binjai yaitu:

“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”

sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Binjai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Binjai tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta

pengawasannya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022 ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Binjai secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, namun kami menyadari bahwa Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022 ini masih belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Binjai pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022. Semoga Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Binjai.

Binjai, Maret 2023

WALI KOTA BINJAI



Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

DAFTAR ISI

1	KATA PENGANTAR
2	DAFTAR ISI
3	PERNYATAAN TELAH DIREVIU
4	BAB I
	PERENCANAAN KINERJA
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai 2021 s.d 2026
9	Perjanjian Kinerja Walikota Binjai 2022
5	BAB II
	CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA
11	Capaian Perjanjian Kinerja 2022
15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2021 dan 2020
15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD
15	Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
18	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
21	Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6	LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BINJAI INSPEKTORAT DAERAH KOTA

BINJAI-20714

Jalan Veteran No. 2 Telp. 8821860

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Binjai untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kota Binjai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapatnya kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Binjai, 28 Maret 2023
INSPEKTUR DAERAH KOTA BINJAI,

Eka Edi Saputra
Drs. EKA EDI SAPUTRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671120 198603 1 002

FORMULIR CHECK LIST REVIU

No.	Pertanyaan			Check list
I	FORMAT	1	Laporan Capaian Akuntabilitas telah menampilkan data penting IP	√
		2	Laporan Capaian Akuntabilitas telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3	Laporan Capaian Akuntabilitas telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	MEKANISME PENYUSUNAN	1	Laporan Capaian Akuntabilitas IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam Laporan Capaian Akuntabilitas telah didukung dengan data yang memadai	√
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Capaian Akuntabilitas	√
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	√
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Capaian Akuntabilitas telah diyakini keandalannya	√
		6	Analisis/penjelasan dalam Laporan Capaian Akuntabilitas telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7	Laporan Capaian Akuntabilitas IP bukan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
III	SUBSTANSI	1	Tujuan/sasaran dalam Laporan Capaian Akuntabilitas telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam Laporan Capaian Akuntabilitas telah selaras dengan rencana strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4	Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam Laporan Capaian Akuntabilitas telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		5	IKU pada Laporan Capaian Akuntabilitas telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10	IKU dan IK telah SMART	√

Binjai, 28 Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH KOTA BINJAI,



Drs. EKA EDI SAPUTRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671120 198603 1 002

BAB I PERENCANAAN KINERJA



2022

BAB I

PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai 2021 s.d 2026

Visi dan misi Pemerintah Kota Binjai telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

1. Visi

Visi Kota Binjai sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS

Visi tersebut mengandung maksud bahwa:

- a. MAJU** mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
- b. BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.
- c. RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh

aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi ” **MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS**” dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.
- b. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

- a. Misi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi;
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima;
4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (the right man on the right place).

- b. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata;
2. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja;
5. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal;
6. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif;
7. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup.

- c. Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan

sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
5. Pembinaan olah raga, kepemudaan, pagayuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan;
6. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dan Target Kinerja

Untuk mencapai ketiga misi pembangunan Kota Binjai dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator tujuan, indikator sasaran, serta target yang hendak dicapai untuk selama 1 (satu) periode RPJMD yaitu 2021 s.d2026.

Tabel tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja 2021-2026

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius												
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi			Kategori	NA	CC	B	B	BB	BB
				Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Indeks Profesionalitas ASN	Poin	29,98	65	68	71	75	81
					Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,22	3,32	3,34	3,36	3,38	3,40

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius												
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
2	Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			nilai	NA	77 (B)	80 (B)	83 (B)	86 (B)	89 (A)
				Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase kondisi jalan baik	Persen	89,86	92	93	94	95	96
					Persentase akses air minum kota	Persen	28	35	40	50	55	60
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,1	54,0	59,0	61,0	64,0	68,7

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius												
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,12	11,4	11,6	11,8	11,9	12,0
					Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	29,20	29,7	30,0	30,2	30,5	30,7
					Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,2	41,4	41,5	41,7	41,8	42,0
				Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,08	6,8	6,5	6,4	6,2	6,0

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius												
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
3	Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			poin	75,89	76,80	77,35	77,90	78,50	79,10
				Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	poin	74,27	75,12	75,74	76,03	76,66	76,96
				Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indek Kesehatan	poin	80,58	81,35	81,62	82,02	82,28	82,68
				Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	poin	73,04	74,74	76,39	78,05	79,73	81,43

d. Perjanjian Kinerja Walikota Binjai 2022

Untuk memastikan ketercapaian rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD 2021-2026, maka setiap Pemerintah Kota Binjai menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai sebuah perencanaan tahunan. Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah bentuk komitmen kinerja yang berisikan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, serta dilengkapi dengan besaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Kota Binjai Tahun 2022.

Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Walikota Binjai Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC
		Opini BPK	Opini	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	65
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3.32
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	77 (B)
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	92
		Persentase akses air minum kota	Persen	35
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	54

4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11.4
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	29.7
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41.4
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6.8
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	75.12
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	81.35
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	74.04

BAB II

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA



2022

BAB II

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Perjanjian Kinerja 2022

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setelah diawal tahun ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2022, dan sepanjang tahun dilaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di RPJMD 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja 2022, maka pada akhir tahun 2022 dan/atau awal tahun 2023 dilakukan pengukuran realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran realisasi indikator kinerja ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Binjai dapat mencapai target- target yang telah diperjanjikan.

Pengukuran kinerja tidak hanya dilakukan oleh internal Pemerintah Kota Binjai sendiri, namun juga dilakukan oleh pihak-pihak lainnya, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Medan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Hasil pengukuran realisasi indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Walikota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	C	66,67	Kementerian PANRB
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	BPK Perwakilan Sumatera Utara
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	65	44,01*	67,71	Kantor Regional VI BKN Medan Tahun 2021
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3.32	3,2185*	96,94	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	77 (B)	80*	103.90	Pemerintah Kota Binjai Tahun 2021
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	92	84.63	91.99	BPS Kota Binjai
		Persentase akses air minum kota	Persen	35	98.79	282.26	BPS Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	54	65.85	121.94%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11.4	11.61	101.84%	BPS Kota Binjai
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB(ADHB)	Persen	29.7	30.24	101.82%	BPS Kota Binjai
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41.4	32.66	78.89%	BPS Kota Binjai
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6.8	7.86	115.59%	BPS Kota Binjai
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	75.12	75.79	100.90	BPS Kota Binjai
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta	Indeks Kesehatan	Poin	81.35	80,69*	99	BPS Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
	pemerataan tenaga kesehatan						
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	74.04	40.49	54.68	BPS Kota Binjai
	Rata-rata Capaian Kinerja					71,34%	

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2021 dan 2020

Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, salah satu informasi yang harus disampaikan pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja ini adalah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan tahun 2020. Perbandingan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, salah satu informasi yang harus disampaikan pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja ini adalah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan tahun 2020. Perbandingan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam standar pengukuran nasional, suatu kinerja dikatakan berhasil jika rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran tersebut berada di atas 90% dari yang ditargetkan. Dan jika dilihat dari capaian kinerja yang disajikan pada tabel 2.1 maka terdapat 6 (enam) dari 8 (delapan) sasaran dapat dikatakan berhasil dikarenakan rata-rata capaian indikator pada sasaran tersebut berada di atas 90%. Sasaran yang dapat disebut berhasil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran dengan rata-rata capaian indikator di atas 90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata- rata capaian indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	77 (B)	80*	103.90	159.38

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-rata capaian indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)
	infrastruktur publik	Persentase kondisi jalan baik	92	84.63	91.99	
		Persentase akses air minum kota	35	98.79	282.26	
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54	65.85	121.94%	121.94
3	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	11.4	11.61	101.84%	94.18
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	29.7	30.24	101.82%	
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	41.4	32.66	78.89%	
4	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.8	7.86	115.59%	115.59
5	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	75.12	75.79	100.90	100.90
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	81.35	80,69	99	99

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya

Jika dilihat dari tabel di atas, maka keenam sasaran yang berhasil adalah sasaran-sasaran yang langsung menyentuh masyarakat, ini berarti dapat dikatakan, program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai telah mampu secara efektif menyentuh permasalahan di masyarakat.

Sedangkan sasaran yang masih belum dapat dikategorikan berhasil hanya sebanyak 2 (dua) dari 8 (delapan) sasaran yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sasaran dengan rata-rata capaian indikator di bawah 90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-rata capaian indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	C	66,67	82.83
		Opini BPK	WTP	WTP	100	
		Indeks Profesionalitas ASN	65	44,01*	67,71	
		Nilai Evaluasi LPPD	3.32	3,2185*	96,94	
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	74.04	40.49	54.68	54.68

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya

Jika dilihat dari tabel di atas, maka sasaran yang dikategorikan belum berhasil terdiri dari 1 (satu) sasaran yang bersifat pembenahan internal pemerintahan Kota Binjai, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan terutama Indeks Reformasi Birokrasi yaitu hanya mendapat predikat C, dari Predikat CC yang ditargetkan, dan Indeks Profesionalitas ASN, yaitu hanya mendapat 44,01 dari 65 yang ditargetkan, walaupun angka 44,01 adalah hasil pengukuran realisasi

tahun 2021.

Satu lagi sasaran yang belum berhasil dan merupakan sasaran yang langsung terkait masyarakat adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator Indeks Pengeluaran. Realisasi Indeks Pengeluaran sebagaimana disebutkan di buku “Binjai Dalam Angka Tahun 2023” yang dikeluarkan BPS Kota Binjai adalah 40,49 atau hanya 54,68% dari yang ditargetkan sebesar 74,04. Ketidaktercapaian indeks pengeluaran ini disebabkan salah satunya pada tahun 2022 masih dalam pandemi covid-19 yang menyebabkan masih terdapatnya pembatasan kegiatan/aktivitas masyarakat di sebagian, yang secara langsung membatasi masyarakat membelanjakan uangnya.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Karena 6 (enam) dari 8 (delapan) sasaran kinerja memiliki realisasi kinerja di atas 90% maka dapat dikatakan program/kegiatan maka dapat dikatakan program dan kegiatan yang dilakukan sudah efektif dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang diperjanjikan di tahun 2022. Adapun program yang menunjang keberhasilan per sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sasaran dengan rata-rata capaian indikator di atas 90% dan program yang mendukung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
		Indeks Profesionalitas ASN	DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Nilai Evaluasi LPPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Persentase kondisijalan baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Persentase akses air minum kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Pencapaian
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Pencapaian
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

F. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran per program pada Pemerintah Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Realisasi Anggaran per Program Tahun 2022

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Program Aplikasi Informatika	2,236,195,349.00	1,736,376,547.00	77.65%

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	25,226,473,714.00	27,663,060,172.00	109.66%
3	Program Hubungan Industrial	50,184,658.00	50,969,150.00	101.56%
4	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	769,902,775.00	1,359,335,701.00	176.56%
5	Program Kawasan Permukiman	525,200,000.00	506,800,000.00	96.50%
6	Program Kepegawaian Daerah	536,600,167.00	520,209,500.00	96.95%
7	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	750,115,978.00	528,087,832.00	70.40%
8	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	52,639,532.00	34,395,000.00	65.34%
9	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	87,838,698.00	57,500,000.00	65.46%
10	Program Pemasaran Pariwisata	310,306,113.00	239,461,159.00	77.17%
11	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20,389,845.00	20,325,278.00	99.68%
12	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2,183,135,845.00	1,420,957,583.00	65.09%
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	866,572,367.00	1,100,207,360.00	126.96%
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	311,108,247.00	213,662,000.00	68.68%
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	356,113,602.00	273,559,875.00	76.82%
16	Program Pemberdayaan Sosial	520,373,455.00	581,930,420.00	111.83%

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
17	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	954,566,649.00	783,498,782.00	82.08%
18	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	311,987,273.00	224,093,977.00	71.83%
19	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	301,463,554.00	173,647,124.00	57.60%
20	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1,514,118,900.00	1,348,293,508.00	89.05%
21	Program Pembinaan Perpustakaan	327,953,437.00	433,161,365.00	132.08%
22	Program Pembinaan Sejarah	150,247,952.00	115,622,483.00	76.95%
23	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	150,107,613.00	124,933,929.00	83.23%
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	72,776,908,737.00	44,750,468,606.00	61.49%
25	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13,299,023,794.00	11,249,169,476.00	84.59%
26	Program Penanganan Bencana	599,354,603.00	551,455,717.00	92.01%
27	Program Penanggulangan Bencana	3,029,028,372.00	2,959,700,000.00	97.71%
28	Program Penataan Bangunan Gedung	25,698,890,677.00	7,209,389,384.00	28.05%
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,016,105,600.00	2,947,800,000.00	97.74%
30	Program Pendaftaran Penduduk	705,463,000.00	554,753,124.00	78.64%
31	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2,810,008,090.00	2,653,848,813.00	94.44%

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
32	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	119,993,718.00	116,343,688.00	96.96%
33	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	227,539,499.00	201,562,793.00	88.58%
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	380,242,924.00	152,221,920.00	40.03%
35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	25,180,901.00	10,486,000.00	41.64%
36	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	169,779,521.00	144,250,200.00	84.96%
37	Program Pengelolaan Arsip	101,051,670.00	96,808,537.00	95.80%
38	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	449,998,399.00	480,628,418.00	106.81%
39	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	406,644,485.00	243,316,900.00	59.84%
40	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6,400,000,000.00	3,974,282,342.00	62.10%
41	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	600,000.00	115,329,000.00	19221.50 %
42	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,118,702,131.00	3,179,726,729.00	101.96%
43	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	43,328,210,297.00	2,017,396,332.00	4.66%
44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,089,335,447.00	3,362,670,401.00	108.85%
45	Program Pengelolaan Pendidikan	98,370,743,595.00	37,180,671,100.00	37.80%
46	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	415,082,881.00	452,726,946.00	109.07%
47	Program Pengelolaan Persampahan	6,780,420,299.00	7,251,651,748.00	106.95%
48	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	25,187,815.00	24,221,500.00	96.16%

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
49	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	79,976,739.00	55,972,940.00	69.99%
50	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7,224,240,000.00	5,289,584,500.00	73.22%
51	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	47,100,842.00	44,049,500.00	93.52%
52	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	69,625,566.00	55,413,300.00	79.59%
53	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	185,731,415.00	116,418,515.00	62.68%
54	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3,027,451,376.00	2,792,292,048.00	92.23%
55	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,388,934,317.00	1,408,425,857.00	101.40%
56	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	314,787,278.00	314,787,278.00	100.00%
57	Program Pengembangan Kebudayaan	604,642,146.00	340,174,326.00	56.26%
58	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	142,357,337.00	239,311,043.00	168.11%
59	Program Pengembangan Perumahan	402,466,911.00	350,143,941.00	87.00%
60	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,319,008,938.00	1,346,246,486.00	102.07%
61	Program Pengembangan Umkm	1,153,903,105.00	1,335,495,443.00	115.74%
62	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	45,791,989.00	44,685,240.00	97.58%
63	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	276,371,684.00	258,797,250.00	93.64%
64	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	388,654,000.00	303,898,413.00	78.19%
65	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	429,718,030.00	358,787,423.00	83.49%

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
66	Program Pengendalian Penduduk	143,086,300.00	140,239,906.00	98.01%
67	Program Penggunaan DanPemasaran Produk DalamNegeri	335,740,463.00	47,210,000.00	14.06%
68	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	52,809,868.00	49,808,600.00	94.32%
69	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	409,079,081.00	490,542,393.00	119.91%
70	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	69,997,680.00	61,792,700.00	88.28%
71	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	879,476,807.00	743,760,850.00	84.57%
72	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	176,481,684.00	115,236,400.00	65.30%
73	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4,376,679,072.00	4,134,335,878.00	94.46%
74	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	158,917,885.00	158,709,063.00	99.87%
75	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	133,770,855.00	145,653,547.00	108.88%
76	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	941,830,788.00	722,396,639.00	76.70%
77	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	13,459,472,663.00	12,385,833,265.00	92.02%

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
78	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,319,340,497.00	1,094,629,968.00	82.97%
79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	606,882,859,907.00	531,685,672,773.00	87.61%
80	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	158,967,216.00	150,985,250.00	94.98%
81	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	331,591,920.00	347,667,522.00	104.85%
82	Program Penyelenggaraan Jalan	18,217,200,000.00	15,596,510,724.00	85.61%
83	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	5,753,349,657.00	5,175,667,739.00	89.96%
84	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5,803,781,736.00	5,305,986,187.00	91.42%
85	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,776,798,935.00	357,097,891.00	20.10%
86	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,406,093,928.00	1,959,308,660.00	81.43%
87	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	65,270,570.00	21,377,560.00	32.75%
88	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	60,238,356.00	34,291,977.00	56.93%
89	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	9,228,570,713.00	6,852,814,000.00	74.26%
90	Program Penyuluhan Pertanian	19,450,169.00	17,691,500.00	90.96%
91	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,912,961,889.00	1,166,599,206.00	60.98%
92	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	9,998,872.00	9,048,000.00	90.49%
93	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,089,652,884.00	865,095,010.00	79.39%

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
94	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	962,336,861.00	882,522,377.00	91.71%
95	Program Perlindungan Khusus Anak	303,507,868.00	337,706,697.00	111.27%
96	Program Perlindungan Perempuan	390,298,163.00	147,259,343.00	37.73%
97	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	496,578,999.00	407,478,050.00	82.06%
98	Program Promosi Penanaman Modal	116,485,765.00	105,544,000.00	90.61%
99	Program Rehabilitasi Sosial	531,058,893.00	523,496,346.00	98.58%
100	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	22,145,949.00	28,776,720.00	129.94%
101	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	87,984,486.00	43,917,650.00	49.92%
	Grand Total	1,020,041,721,230.00	778,358,116,313.00	76.31%

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

$$1 - [(\% \text{realisasi anggaran} \times (1 / \% \text{capaian kinerja})) \times 100\%]$$

Dengan rata-rata % realisasi anggaran sebesar 76,31% (tabel 2.4) dan Rata-rata % capaian kinerja sebesar 71,34% maka tingkat efisiensi anggaran pada Pemerintah Kota Binjai adalah:

$$= 1 - [76,31\% \times (1/71,34\%)] \times 100\%$$

$$= - 6,97\%$$

Tabel 2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2021 dan 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	C	66,67	C	C
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	65	44,01*	67,71	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3.32	3,2185*	96,94	3,2185	3,2185
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	77 (B)	80*	103.90	80	80
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	92	84.63	91.99	96,42	Tidak terdapat hasil pengukuran
		Persentase akses air minum kota	Persen	35	98.79	282.26	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	54	65.85	121.94%	62,45	47,1
4	Meningkatny a peranan	Kontribusi Sektor Industri	Persen	11.4	11.61	101.84%	11,12	11,12

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)
	sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	terhadap PDRB (ADHB)						
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	29.7	30.24	101.82%	Pada PK 2021 Indikator Sektor Perdagangan masih bergabung dengan sektor jasa	Pada PK 2021 Indikator Sektor Perdagangan masih bergabung dengan sektor jasa
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41.4	32.66	78.89%	Pada PK 2021 Indikator Sektor Jasa masih bergabung dengan sektor perdagangan	Pada PK 2021 Indikator Sektor Jasa masih bergabung dengan sektor perdagangan
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6.8	7.86	115.59%	8,67	8,67
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	75.12	75.79	100.90	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	81.35	80,69*	99	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	74.04	40.49	54.68	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya

Tabel 2.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Target 2026 (RPJMD 2021-2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	C	66,67	BB
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	65	44,01*	67,71	81
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3.32	3,2185*	96,94	3,40
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	77 (B)	80*	103.90	80
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	92	84.63	91.99	96
		Persentase akses air minum kota	Persen	35	98.79	282.26	60
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	54	65.85	121.94%	68,7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Target 2026 (RPJMD 2021-2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$\frac{(7)}{(6)/(5)}$	(8)
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11.4	11.61	101.84%	12,0
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	29.7	30.24	101.82%	30,7
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41.4	32.66	78.89%	42
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6.8	7.86	115.59%	6,0
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	75.12	75.79	100.90	76,96

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Target 2026 (RPJMD 2021-2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$\frac{(7)}{(6)/(5)}$	(8)
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	81.35	80,69	99	82,68
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	74.04	40.49	54.68	81,43

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya

LAMPIRAN



2022



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan Akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP**

Jabatan : **WALI KOTA BINJAI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Binjai, Maret 2022
WALI KOTA BINJAI,

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC
		Opini BPK	Opini	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	65,00
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,32
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	77 (B)
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	92,00
		Persentase akses air minum kota	Persen	35
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	54,00
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,40
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	29,70
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,40
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,80
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	75.12
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga	Indeks Kesehatan	Poin	81,35

	kesehatan			
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	74.04

No	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 606.882.859.907	APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 25.226.473.714	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 43.328.210.297	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 449.998.399	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 3.089.335.447	APBD
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 143.086.300	APBD
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 1.514.118.900	APBD
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 2.183.135.845	APBD
9	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 185.731.415	APBD
10	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 116.485.765	APBD
11	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 388.654.000	APBD
12	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 327.953.437	APBD

13	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 101.051.670	APBD
14	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 25.180.901	APBD
15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 390.298.163	APBD
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 133.770.855	APBD
17	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 25.187.815	APBD
18	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 150.107.613	APBD
19	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 303.507.868	APBD
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 866.572.367	APBD
21	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Rp 87.838.698	APBD
22	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 380.242.924	APBD
23	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 50.184.658	APBD
24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 1.319.340.497	APBD
25	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 22.145.949	APBD
26	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 87.984.486	APBD
27	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 335.740.463	APBD
28	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 9.998.872	APBD

29	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp 9.988.479	APBD
30	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 79.976.739	APBD
31	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 705.463.000	APBD
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 2.406.093.928	APBD
33	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 496.578.999	APBD
34	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER ORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 72.776.908.737	APBD
35	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 176.481.684	APBD
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 311.108.247	APBD
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp 47.100.842	APBD
38	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 879.476.807	APBD
39	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 415.082.881	APBD
40	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 52.809.268	APBD
41	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 331.591.920	APBD

42	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 158.967.216	APBD
43	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 276.371.684	APBD
44	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 45.791.989	APBD
45	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 19.450.169	APBD
46	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.089.652.884	APBD
47	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 750.115.978	APBD
48	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 227.539.499	APBD
49	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 5.803.781.736	APBD
50	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 356.113.602	APBD
51	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 52.639.532	APBD
52	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 769.902.775	APBD
53	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 2.236.195.349	APBD
54	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 60.238.356	APBD
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Rp 65.270.570	APBD

	PENGAMANAN INFORMASI		
56	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 1.912.961.889	APBD
57	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 13.299.023.794	APBD
58	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 409.079.081	APBD
59	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 941.830.788	APBD
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 20.389.845	APBD
61	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 301.463.554	APBD
62	PROGAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 158.917.885	APBD
63	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 604.642.146	APBD
64	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp 142.357.337	APBD
65	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp 150.247.952	APBD
66	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 310.306.113	APBD
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 1.388.934.317	APBD

68	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 3.027.451.376	APBD
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 314.787.278	APBD
70	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 169.779.521	APBD
71	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KST/UST KOPERASI	Rp 69.997.680	APBD
72	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPRASIAN	Rp 119.993.718	APBD
73	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 954.566.649	APBD
74	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 1.153.903.105	APBD
75	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rp 7.224.240.000	APBD
76	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 600.000	APBD
77	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 406.644.485	APBD
78	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 6.400.000.000	APBD
79	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 25.698.890.677	APBD
80	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 18.217.200.000	APBD
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 1.776.798.935	APBD
82	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 402.466.911	APBD

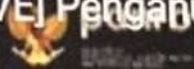
83	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 525.200.000	APBD
84	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 13.459.472.663	APBD
85	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 9.228.570.713	APBD
86	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 98.370.743.595	APBD
87	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 2.810.008.090	APBD
88	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 429.718.030	APBD
89	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 3.118.702.131	APBD
90	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 311.987.273	APBD
91	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 6.780.420.299	APBD
92	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 536.600.167	APBD
93	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 1.319.008.938	APBD
94	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 4.376.679.072	APBD
95	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 520.373.455	APBD
96	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 531.058.893	APBD

97	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 962.336.861	APBD
98	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 599.354.603	APBD
99	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 69.625.566	APBD
100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 5.753.349.657	APBD
101	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 3.029.028.372	APBD
102	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 3.016.105.600	APBD
JUMLAH		Rp 1.020.651.109.109	

Binjai, Maret 2022



LIVE Pengantar Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022



PENYERAHAN
HASIL EVALUASI SAKIP & RB
2022

Provinsi Sumatera Utara

*** SAKIP**

RB

Kota Binjai

CC

C

Kota Gunung Sitoli

CC

CC

Kota Medan

B

CC

Kota Padangsidimpuan

B

CC

Kota Pematang Siantar

CC

C

Kota Sibolga

CC

C

Kota Tanjung Balai

B

C

Kota Tobing Tinggi

B

CC

BERAKHIR

Scroll untuk mengetahui detailnya

• LIVE



A485



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Binjai bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Binjai. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Binjai, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

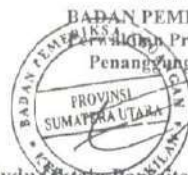
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Binjai tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 55.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 18 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Eydu Pratomo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.†
Registrar Negara Akuntan No. RNA 19067



Daftar Skor, Prestasi dan Peringkat Antar Kabupaten dan kota
Provinsi : SUMATERA UTARA

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Provinsi	Skor	Prestasi
1	KOTA PEMATANGSIANTAR	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.4939	TINGGI
2	KABUPATEN DELI SERDANG	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.4392	TINGGI
3	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.4278	TINGGI
4	KOTA PADANGSIDIMPUAN	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.3906	TINGGI
5	KABUPATEN SAMOSIR	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.3244	TINGGI
6	KOTA TEBING TINGGI	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.3107	TINGGI
7	KABUPATEN TAPANULI UTARA	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.2798	TINGGI
8	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.2470	TINGGI
9	KABUPATEN ASAHAN	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.2377	TINGGI
10	KOTA SIBOLGA	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.2260	TINGGI
11	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.2225	TINGGI
12	KOTA BINJAI	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.2185	TINGGI
13	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.1869	TINGGI
14	KABUPATEN TOBA	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.1719	TINGGI
15	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.1682	TINGGI
16	KOTA MEDAN	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.1168	TINGGI
17	KOTA TANJUNGBALAI	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.0658	TINGGI
18	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.0388	TINGGI
19	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PROVINSI SUMATERA UTARA	3.0323	TINGGI
20	KABUPATEN KARO	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.9434	SEDANG
21	KABUPATEN NIAS	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.9274	SEDANG
22	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.9003	SEDANG
23	KABUPATEN BATUBARA	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.7756	SEDANG
24	KABUPATEN SIMALUNGUN	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.7370	SEDANG
25	KABUPATEN MANDAILING NATAL	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.7175	SEDANG
26	KOTA GUNUNG SITOLI	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.6959	SEDANG
27	KABUPATEN PADANG LAWAS	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.6848	SEDANG
28	KABUPATEN LABUHAN BATU	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.6246	SEDANG
29	KABUPATEN NIAS UTARA	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.5731	SEDANG
30	KABUPATEN DAIRI	PROVINSI SUMATERA UTARA	2.1186	SEDANG
31	KABUPATEN NIAS SELATAN	PROVINSI SUMATERA UTARA	1.9044	RENDAH
32	KABUPATEN NIAS BARAT	PROVINSI SUMATERA UTARA	1.7999	RENDAH
33	KABUPATEN LANGKAT	PROVINSI SUMATERA UTARA	1.7566	RENDAH



INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA
UTARA

(Lasro Marbun)



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kota Binjai
Provinsi Sumatera Utara



Kepala Daerah : Drs. H. Amir Hamzah, M.AP
Luas Wilayah : 9413.88358033
Populasi : 0

Kepala DPRD : H. Noor Sri Alam Putra, SE
Kategori Daerah : -
Pendapatan Per Kapita : 0

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup
65.85

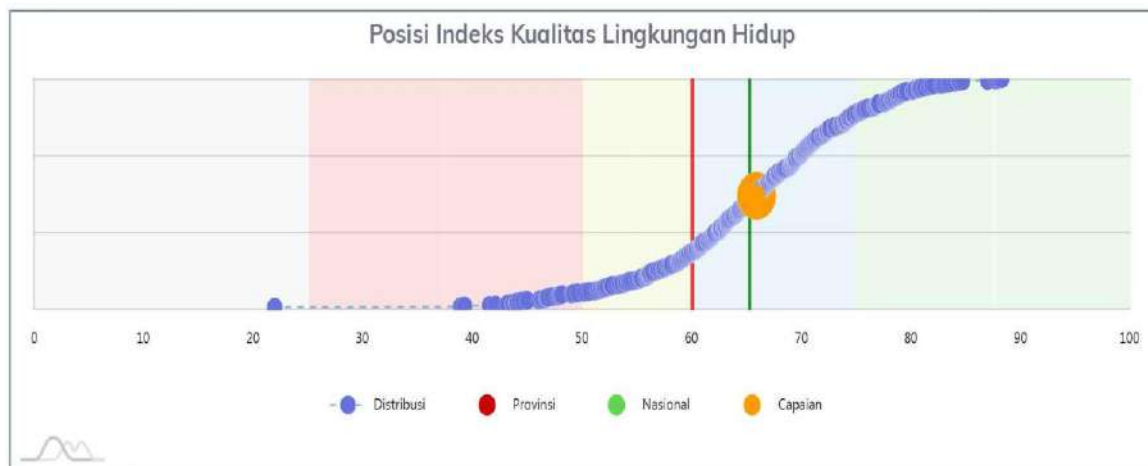
SEDANG

Peringkat

Nasional : 248 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 13 dari 33 Kabupaten/Kota

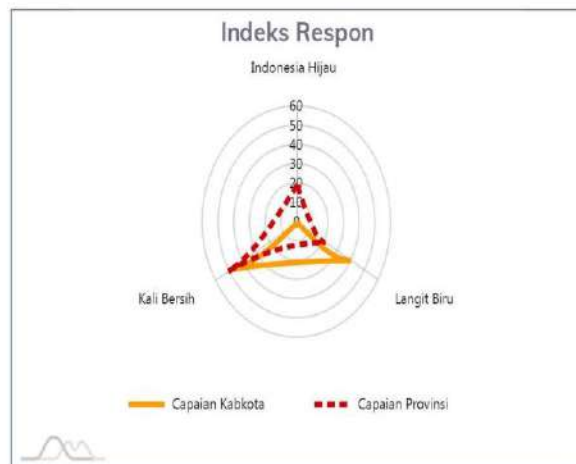
Posisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	8	8	8
AIR	3	6	3
LAHAN	0	1	1
TOTAL	11	15	12

Indeks Respon



Sebaran Titik Pemantauan



Rekomendasi

Lampiran Surat Kepala Kantor Regional VI
 Badan Kepegawaian Negara
 Nomor : 068 /KR.VI/BKN/I/2022
 Tanggal : 24 Januari 2022

**DAFTAR NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN SEMENTARA TAHUN 2021
 KEJADIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 METODE PENGUKURAN SAPK**

INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	DIMENSI				NILAI	KATEGORI
		KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN		
KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN							
Pemerintah Kab. Asahan	5.741	12,07	9,28	19,65	5,00	46,00	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Batubara	3.556	13,14	9,79	0,45	5,00	28,38	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Binjai	4.053	13,04	8,64	17,34	4,99	44,01	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Dairi	4.140	11,71	9,55	11,13	5,00	37,39	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Deli Serdang	10.577	13,11	11,24	20,76	4,99	50,10	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2.537	12,57	8,81	24,22	4,97	50,57	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	3.812	12,87	9,31	9,04	4,99	36,21	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Karo	4.845	12,37	9,25	15,46	5,00	42,09	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Labuhanbatu	4.570	12,45	8,18	16,38	5,00	42,01	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	2.519	12,86	9,57	7,36	5,00	34,79	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	3.328	13,00	9,94	6,69	5,00	34,63	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Langkat	8.841	12,57	10,85	20,67	5,00	49,09	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Mandailing Natal	5.581	12,53	9,84	12,71	4,99	40,08	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Medan	11.624	13,44	7,91	23,84	4,99	50,19	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Nias	2.536	12,17	7,46	17,09	4,91	41,64	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Nias Barat	1.660	13,21	7,00	5,60	5,00	30,81	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Nias Selatan	3.620	11,60	7,64	0,94	5,00	25,19	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Nias Utara	2.303	12,37	6,17	13,89	4,99	37,41	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Padang Lawas	3.105	12,34	10,21	23,25	5,00	50,80	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	3.505	12,50	9,57	19,61	5,00	46,68	Sangat Rendah

INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	DIMENSI				NILAI	KATEGORI
		KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN		
Pemerintah Kab. Padangsidempuan	3.267	12,67	7,72	1,30	5,00	26,68	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	1.798	12,11	7,99	0,88	5,00	25,97	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Pematangsiantar	3.835	12,67	7,55	22,35	4,99	47,56	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Samosir	2.890	12,89	10,65	7,25	5,00	35,78	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	4.931	13,21	9,55	0,07	5,00	27,83	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Sibolga	2.272	12,80	6,36	22,36	4,95	46,48	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Simalungun	7.811	11,92	10,63	4,74	5,00	32,30	Sangat Rendah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	23.813	14,08	9,72	9,76	4,97	38,53	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Tanjungbalai	2.579	12,37	7,44	22,41	4,97	47,20	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	4.083	12,73	8,34	24,49	5,00	50,55	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	4.494	11,84	9,37	19,24	5,00	45,45	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	4.550	11,79	9,53	3,99	5,00	30,31	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Tebing Tinggi	2.462	12,89	8,01	23,45	5,00	49,35	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Toba Samosir	3.591	12,61	8,96	23,34	4,99	49,90	Sangat Rendah

**CASCADE PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN 2022**

VISI :
Mewujudkan Binjai yang Lebih
Maju, Berbudaya dan Religius

MISI 1 :
Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Efektif,
Efisien, Melayan dan
Profesional

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan

Indikator Kinerja :
1. Indeks Reformasi
Birokrasi
2. Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan daerah
ASN
3. Indeks Profesionalitas
ASN
4. Nilai Evaluasi LPPD

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Keterwakilan
dan Kualitas Infrastruktur
Publik

Indikator Kinerja :
1. Indeks Kepuasan
Layanan Infrastruktur
2. Persentase Kondisi Jalan
Bak
3. Persentase Akses Air
Minum Kota

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja :
1. Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup

MISI 2 :
Meningkatkan Infrastruktur
Pertumbuhan Ekonomi Berbasis
Pembudayaan Masyarakat yang
Berwawasan Lingkungan

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Peran Sektor
Industri Ekonomi Kreatif,
Jalan dan Perdagangan

Indikator Kinerja :
1. Pertumbuhan Ekonomi
(PDRB)
2. Kontribusi Sektor Industri
Terhadap PDRB (ADHB)
3. Kontribusi Sektor
Perdagangan Terhadap
PDRB (ADHB)
4. Kontribusi Sektor Jasa
Terhadap PDRB (ADHB)

Sasaran Strategis :
Menciptakan Lapangan
Kerja dan Mempercepat
Ternulainya Sentra
Industri Binjai

Indikator Kinerja :
1. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TP)

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Akses dan
Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Kinerja :
1. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
2. Indeks Pendidikan

MISI 3 :
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan
Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Akses dan
Kualitas Layanan Kesehatan
serta Peningkatan Tenaga
Kesehatan

Indikator Kinerja :
1. Indeks Kesehatan

Sasaran Strategis :
Meningkatnya
Kecerdikn Masyarakat

Indikator Kinerja :
1. Indeks Penguasaan

Sekolah OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kota

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Tenaga Kerja dan
Perdagangan, Perdagangan,
Dinas Koperasi dan UKM,
Dinas Pariwisata

Dinas Tenaga Kerja dan
Perdagangan, Perdagangan

Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan, Dinas
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, dan
Dinas Pariwisata

Dinas Kesehatan, dan Dinas
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Sekolah OPD

1. Program Pengelolaan
Aplikasi Informatika
2. Program Penyelenggaraan
Pendidikan untuk
Pengembangan Informasi
3. Program Pengembangan
Daerah
4. Program Peningkat
Utusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

1. Program Penyelenggaraan
Jalan
2. Program Penyelenggaraan
dan
Pengembangan Sistem
Pengelolaan Air Minum

1. Program Pengendalian
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Penyelenggaraan
Pelestarian Ruang

1. Program Peningkatan
Ukuran Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro
(UMKM)
2. Program Pengembangan
UMKM
3. Program Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan
4. Program Peningkatan dan
Pembangunan Industri

1. Program Peningkatan
Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja
dan Produktivitas Tenaga
Kerja
3. Program Peningkatan
Tenaga Kerja

1. Program Pengelolaan
Pendidikan
2. Program Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan
Keberdayaan
4. Program Pengembangan
Keahlian Tradisional
5. Program Penelitian dan
Pengelolaan Cagar Budaya

1. Program Peningkatan
Ukuran Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro
(UMKM)
2. Program Pengembangan
UMKM
3. Program Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan
4. Program Peningkatan dan
Pembangunan Industri

1. Program Peningkatan
Kecerdikn Masyarakat
2. Program Peningkatan
Kecerdikn Masyarakat
3. Program Peningkatan
Kecerdikn Masyarakat



RENCANA AKSI ATAS PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA BINJAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PEMANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN				
			TW1	TW2	TW3	TW4								TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		25%	25%	25%	25%	1	PROGRAM PENTELINGGAHAN PENGAWASAN	Kegiatan terkait penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan BPK, persentase tindak lanjut temuan APF, persentase OPD yang memiliki laporan kinerja sangat baik dan kinerja sangat baik dan baik	87% tindak lanjut BPK, 90% tindak lanjut APF 8 OPD yang memiliki laporan kinerja sangat baik 61% OPD yang memiliki laporan kinerja baik	Rp	2.406.093,928	Inspektorat				
			25%	25%	25%	25%	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMANGGUPAN DAERAH	Dokumen Perencanaan Pembangunan Lra Tahun Daerah (RPJMD dan Renstra SKPD)	Jumlah dokumen perencanaan yang dipertahankan dan diperkembangkan	Menyusun target OPD dalam 1 Tahun	Rp	1.089,652,884	Bappeda				
			25%	25%	25%	25%	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMANGGUPAN DAERAH	Kegiatan fasilitasi perencanaan pengembangan Kota Binjai	persentase program RPJMD yang terkomodir dalam RKPD	Menyusun target OPD dalam 1 Tahun	Rp	750,115,978	Bappeda				
			25%	25%	25%	25%	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kegiatan pencapaian target pererapan penelitian dan pengembangan daerah tepat guna	jumlah penelitian dan kajian daerah yang diimplementasikan	Menyusun target OPD dalam 1 Tahun	Rp	227,539,499	Bappeda				
			25%	25%	25%	25%	5	PROGRAM PENYELENGAARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan mutu pelayanan publik	Jumlah kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan mutu pelayanan publik	Menyusun target masing-masing OPD dalam 1 Tahun, diklat teknis dan fungsional 288 orang	Rp	5.803,781,736	Sekolah OPD				
			25%	25%	25%	25%	6	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemko Binjai, jumlah informasi publik yang terpublikasi, jumlah kunjungan masyarakat di website Pemko Binjai	30 OPD yang terintegrasi dengan website Pemko Binjai, 16.425 kunjungan masyarakat di website Pemko Binjai	Rp	769,902,775	Dinas Kominfo				
			25%	25%	25%	25%	7	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pelita insiatif DPRD yang diterbitkan	tercapainya peraturan daerah	100%	Rp	25.226,473,714	Sekretariat DPRD				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mengingatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	25%	25%	25%	25%	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	kegiatan pencapaian perencanaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks tutupan lahan	indeks kualitas air: 53,81 indeks kualitas udara: 84,1 indeks tutupan lahan: 0	meningkatkan kualitas air dan udara di Bngjal	Rp	429.718.030	Dinas Lingkungan Hidup				
		50%	25%	25%	25%	2	PROGRAM PENGENDALIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	kegiatan Perencanaan Pokon dan Pengijinan di Kota Bngjal	Cakupan Perindugan dan konservasi Sumber Daya Alam	93%	Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam	Rp	3.118.702.131	Dinas Lingkungan Hidup				
		50%	25%	25%	25%	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Perugwasan Perusahaan Wgib Amdal, UKL/UKL dan SPTL	Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	40 Amdal = 3, UKL- UPL/DPLH = 22, SPTL-15	Meningkatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Rp	311.987.273	Dinas Lingkungan Hidup				
		25%	25%	25%	25%	4	PROGRAM PENGENDALIAN PERSAMPAHAN	kegiatan Pengelolaan Persampahan dan Jumlah TPS komunal /Regional yang dibangut	Cakupan tempat pengumpulan sampah (TPS) per satuan penduduk	90%	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	6.780.420.299	Dinas Lingkungan Hidup				
Mengingatnya peranan sektor industri ekonomi kecil, jasa dan perdagangan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	25%	25%	25%	25%	5	PROGRAM PENGENDALIAN TANAMAN MAKAM PAHLAWAN	kegiatan Pengelolaan tanaman makam pahlawan	Cakupan Pengelolaan tanaman makam pahlawan	100%	Facilitasi Pengelolaan tanaman makam pahlawan	Rp	69.625.566	Dinas Sosial				
		50%	25%	25%	25%	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sistem Mendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase industri kecil/ rumah industri (IKM) mendapat pembinaan	75%	Terwujudnya Sistem Mendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	954.566.649	Dinas Koperasi dan UMKM				
		50%	25%	25%	25%	2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orienasi pengembangan usaha menjadi usaha kecil	jumlah usaha mikro dan kecil	1 tahun	peringkatan usaha menjadi usaha mikro dan kecil	Rp	1.153.903.105	Dinas Koperasi dan UMKM				
		25%	25%	25%	25%	3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	kegiatan keterlibatan perantara dalam pengembangan perubahan hubungan industrial	persentase pertumbuhan keaja yang layak (PP/PG, LKS biarte, struktur skala upah dan terdatur peserta BUIS ketenagakerjaan	1 Tahun	Menurunnya keanu perubahan hubungan industrial yang terlaksana	Rp	50.184.658	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag				

[illegible]

[illegible]

Indikator Pendidikan	25%	25%	25%	25%	6	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP yang terklasifikasi	Pendataan dan monitoring Arsip yang terklasifikasi	Cakupan Data Arsip yang terklasifikasi	Menyusun target OPD dalam 1 Tahun	Facilitasi dan pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp	101.051,670	Dinas Perpustakaan				
					7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi	persentase partisipasi politik masyarakat dalam pilkada/pileg/pilpres	100%	Facilitasi kelengkapan pemerintahan, pelayanan dan partai politik, pemilu/pilkada serta pemantapan situasi politik	Rp	941.830,788	Badan Kesbangpol				
	25%	25%	25%	25%	8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kegiatan terkait pemberdayaan dan pemantapan organisasi kemasyarakatan	persentase organisasi yang terdaftar dan tercatat di Kota Binjai	100%	Facilitasi perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp	20.389,845	Badan Kesbangpol				
				50%	9	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kegiatan terkait pembinaan dan pengembangan keragaman ekonomi, sosial dan budaya di Kota Binjai	persentase penanganan konflik berbasis sosial dan budaya	100%	Facilitasi dan monitoring keragaman ekonomi, sosial dan budaya yang terbiasa dan berkembang	Rp	158.917,885	Badan Kesbangpol				
			50%	50%	10	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	kegiatan dalam meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat dan kewaspadaan konflik sosial	persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi	100%	Meningkatkan kewaspadaan konflik sosial dan pemberantasan penyakit masyarakat	Rp	158.917,885	Badan Kesbangpol				
	25%	25%	25%	25%	11	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	pendidikan dan latihan yang berorientasi perkoperasian	jumlah SDM koperasi yang berorientasi	1 tahun	Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan Koperasi	Rp	119.993,718	Dinas Koperasi dan UKM				
	25%	25%	25%	25%	12	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	pembinaan sejarah lokal	Jumlah dokumenasi sejarah	6 kegiatan	meningkatkan pembinaan sejarah	Rp	150.247,952	Dinas Pariwisata				
	25%	25%	25%	25%	13	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAMPUAN	kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi perempuan	jumlah kewira yang aktif	5 kewira	kapasitas kewira aktif yang baik	Rp	314.787,278	Dinas Pemuda dan Olahraga				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TARGET DAN REALISASI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA BINJAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	REALISASI	PEKANGGUNG JAWAB
1	2	3	8	9	10	11	12	13		14
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		1 PROGRAM PENYELENGARAAN PENGAWASAN	kegiatan terkait penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan BPK, persentase tindak lanjut temuan APF, persentase OPD yang memiliki laporan kinerja sangat baik dan baik	87% tindak lanjut BPK, 90% tindak lanjut APF, 8 OPD yang memiliki laporan kinerja sangat baik 61% OPD yang memiliki laporan kinerja baik	meningkatkan penyelenggaraan pengawasan	Rp 2.406.093,928	Rp 1.959.308,660	Inspektorat
			2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahun Daerah (RPJMD dan Renstra SKPD)	jumlah dokumen perencanaan yang diperdikan dan diperkadakan	Menyesuaikan target OPD dalam 1 Tahun	Tertata dan tersusun Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Juknis dan Juknis	Rp 1.089.652,884	Rp 865.095,010	Bappeda
			3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan Kota Binjai	persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	Menyesuaikan target OPD dalam 1 Tahun	Dokumen perencanaan pembangunan Kota Binjai	Rp 750.115,978	Rp 528.087,832	Bappeda
			4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMANGAN DAERAH	Kegiatan pencapaian target, penerapan penelitian dan pengembangan daerah tepat guna	jumlah penelitian dan kajian daerah yang diimplementasikan	Menyesuaikan target OPD dalam 1 Tahun	Tertapanya penerapan penelitian dan pengembangan daerah tepat guna	Rp 227.539,499	Rp 201.562,793	Bappeda
			5 PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan mutu pelayanan publik	Jumlah Kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan mutu pelayanan publik	Menyesuaikan target masing-masing OPD dalam 1 Tahun, diklat teknis dan fungsional 288 orang	Kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp 5.803.781,736	Rp 5.305.986,187	Seluruh OPD

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	6	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemko Binjai, jumlah informasi publik yang terpublikasi, jumlah kunjungan masyarakat ke website Pemko Binjai	30 OPD yang terintegrasi dengan website Pemko Binjai, 16.425 kunjungan masyarakat ke website Pemko Binjai	Facilitasi Pengembangan Data/Informasi	Rp 769,902,775	Rp 1,359,335,701	Dinas Kominfo
	7	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Perda Inisiatif DPRD yang diterbitkan	tersusunnya peraturan-peraturan daerah	100%	Monitoring dan evaluasi Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 25,226,473,714	Rp 27,663,060,172	Sekretariat DPRD
	8	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	kegiatan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SIPP	level 3	meningkatkan nilai maturitas penyelenggaraan SIPP	Rp 496,578,999	Rp 407,478,050	Inspektoral
	1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kerjasama Pengelolaan Aplikasi dan Informasi	jumlah aplikasi pemerintah daerah berbasis elektronik yang dilevel, jumlah titik hotspot di ruang publik	10 aplikasi, 50 titik hotspot di ruang publik	fasilitasi Kerjasama Informasi Pengelolaan Aplikasi dan Informasi	Rp 2,236,195,349	Rp 1,736,376,547	Dinas Kominfo
	2	PROGRAM PENYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	cakupan perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	85%	meningkatkan pengamanan keamanan informasi pemerintah daerah kota Binjai berbasis elektronik dan non elektronik	Rp 65,270,570	Rp 21,377,560	Dinas Kominfo
	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat pertanggungjawaban laporan kinerja dan keuangan	persentase SIL/PA terhadap APBD, Opini BPK	0,0180% SIL/PA, WTP	Meningkatkan efisiensi belanja dan Pendapatan Asli Daerah	Rp 43,328,210,297	Rp 2,017,396,332	Seluruh OPD, Dinas BPKPAD
	4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	pengelolaan barang milik daerah	kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	3,50%	terkelolanya barang milik daerah	Rp 449,998,399	Rp 480,628,418	Seluruh OPD, BPKPAD
	5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	persentase PAD terhadap APBD, pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	13% PAD terhadap APBD, 3% pajak dan retribusi	terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Rp 3,089,335,447		BPKPAD

Indeks Profesionalitas ASN	1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan ASN	rasio ketersediaan dan kebutuhan ASN	100%	pergedaan, pemberitahuan dan informasi kepegawain ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Rp	536,600,167	Rp	3,362,670,401	BKD
	2	PROGRAM PEGEMBARAN SUMBER DAYA MANUSIA	kegiatan peningkatan SDM yang mendapat pendidikan / pelatihan formal/ nonformal	Indeks profesional ASN	nilai (65)	pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi, kembangan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Rp	1,319,008,938	Rp	1,346,246,486	BKD
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Menyesuaikan target masing-masing OPD dalam 1 Tahun	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Dokumen Kapasitas penunjang urusan pemerintah daerah	Rp	606,892,859,907	Rp	531,685,672,773	Seluruh OPD, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi
	2	PROGRAM PENYELANGGARAN STATISTIK SEKTORAL	Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral	Sinkronisasi data statistik sektoral pemerintah Kota	1 dokumen	Pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral	Rp	60,238,356	Rp	34,291,977	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1	PROGRAM PENATAN BANGUNAN GEDUNG	pelaksanaan penataan bangunan gedung	terlaksananya penataan bangunan gedung	100%	penyelenggaraan bangunan gedung, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Rp	25,698,890,677	Rp	7,209,389,384	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang	tercapainya kesesuaian peruntukan lahan/ ruang	100%	Perencanaan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Rp	1,776,798,935	Rp	357,097,891	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

[illegible]

[illegible]

Mengingatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sistem Mendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase industri kreatif terutama industri kecil/home industri (IKM) mendapat pembinaan	75%	Terwujudnya Sistem Mendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	954,566,649	Rp	783,498,782	Dinas Koperasi dan UMKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil	jumlah usaha mikro dan kecil	1 tahun	peningkatan usaha menjadi usaha mikro dan kecil	Rp	1,153,903,105	Rp	1,335,495,443	Dinas Koperasi dan UMKM
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	kegiatan keterlibatan pemerintah dalam penanganan persoalan hubungan industrial	persentase perusahaan menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	1 Tahun	Menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial yang terakumulasi	Rp	50,184,658	Rp	50,969,150	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	pemberian IUI, IPU, UKI dan IPKI	pertambahan jumlah industri	Menyusun target OPD dalam 1 Tahun	meningkatnya jumlah industri di Binjai	Rp	9,988,479			Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	penyediaan informasi industri untuk IUI, IPU, UKI dan IPKI	jumlah IKM yang terdaftar dalam SINAS	200 IKM	terfasilitasinya pengelolaan sistem informasi industri nasional	Rp	79,976,739	Rp	55,972,940	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	jumlah investor PMA/PMIDN, jumlah nilai investasi PMA/PMIDN	Menyusun target OPD dalam 1 Tahun	meningkatnya jumlah investor PMA/PMIDN dan jumlah nilai investasi PMA/PMIDN	Rp	116,485,765	Rp	105,544,000	Dinas PMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kegiatan terhadap pendukung sumber daya peningkatan produksi sebagai kemandirian pangan	persentase ketersediaan pangan	Menyusun target OPD dalam 1 Tahun	Tercapainya peningkatan produksi sebagai kemandirian pangan	Rp	47,100,842	Rp	44,049,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)											
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	penyediaan dan penyuluran pangan pokok atau pangan lainnya	jumlah kebutuhan pangan lokal	29175,23 ton	terpenuhinya kebutuhan pangan lokal	Rp	879,476,807	Rp	743,760,850	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	pemberdayaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan	jumlah produksi ikan budidaya	2 kegiatan	terpenuhinya produksi ikan budidaya	Rp	415,082,881	Rp	452,726,946	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	jumlah produksi hasil ikan	2 kegiatan	pemasaran hasil produksi skala mikro dan kecil	Rp	52,809,268	Rp	49,808,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	3 kegiatan	produktivitas bahan pangan utama lokal per hektar bibit holikultural	Rp	331,591,920	Rp	347,667,522	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	kegiatan pendukung pemasaran hasil produksi peternakan	penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	3 kegiatan	Capaian target perlindungan pemasaran hasil produksi peternakan	Rp	276,371,684	Rp	258,797,250	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1 kegiatan	fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp	45,791,989	Rp	44,685,240	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENYULIHAN PERTANIAN	Frekuensi kegiatan pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan	Jumlah kegiatan pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan	Menyusutkan jadwal penyuluhan UPTD	Terlaksananya pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan	Rp	19,450,169	Rp	17,691,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	pengembangan dan pembangunan sarana pertanian	terlaksananya pengembangan dan pembangunan sarana pertanian	2 kegiatan	tersedianya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan	Rp	331,591,920	Rp	150,985,250	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	persentase pasar yang dibangun dan dipelihara	52%	terpeliharanya pasar	Rp	1,319,340,497	Rp	1,094,629,968	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	kegiatan terkait stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	tingkat inflasi	Menyusunakan target OPD dalam 1 Tahun	terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp	22,145,949	Rp	28,776,720	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	3	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan	persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UUTP) bertanda tara sah yang berlaku	100%	fasilitasi standarisasi dan perlindungan konsumen	Rp	87,984,486	Rp	43,917,650	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	4	PROGRAM PENGUNJUAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	pelaksanaan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	persentase pertumbuhan sektor perdagangan	Menyusunakan target OPD dalam 1 Tahun	peringkatan penggunaan produk dalam negeri	Rp	335,740,463	Rp	47,210,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBAANGUNAN INDUSTRI	penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Menyusunakan target OPD dalam 1 Tahun	fasilitasi kegiatan perencanaan dan pembangunan industri	Rp	9,998,872	Rp	9,048,000
	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Monitoring dan pengawasan serta pemeriksaan koperasi	Tingkat Monitoring dan pengawasan serta pemeriksaan koperasi	100%	Terlaksana Monitoring dan pengawasan serta pemeriksaan koperasi	Rp	169,779,521	Rp	144,250,200	Dinas Koperasi dan UMKM
	3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KST/ USP KOPERASI	Monitoring dan Evaluasi penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi	Keterlibatan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	100%	Terlaksana Keterlibatan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	69,997,680	Rp	61,792,700	Dinas Koperasi dan UMKM
	4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kegiatan Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pariwisata, Mengikuti Festival Pariwisata, Even Bukit Barisan di Kota Binjai	Jumlah pemasaran pariwisata	8 kegiatan	Facilitasi dan Pengembangan objek ekowisata lingkungan yang dikembangkan dalam Destinasi Pariwisata	Rp	310,306,113	Rp	239,461,159	Dinas Pariwisata
5	Menetapkan						Rp	7,089,666,456	Rp	6,110,739,370	

Isipangan kerja dan mempercepat terwujudnya sentra Industri Binjai	PROGRAM PELATIHAN KERAJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		kegiatan & evaluasi		persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan untuk produktivitas tenaga kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag	
	1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	kegiatan terkait Penempatan tenaga kerja, kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	250 orang	Pengembangan Kewirausahaan dan Penempatan tenaga kerja	Rp	87.838,698	Rp	57.500.000
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN, jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Menyusunakan target OPD dalam 1 Tahun	meningkatkan daya serap tenaga kerja PMA/PMDN dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Rp	185.731.415	Rp	116.418.515
	3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN	Menyusunakan target OPD dalam 1 Tahun	meningkatkan daya serap tenaga kerja PMA/PMDN	Rp	388.654.000	Rp	303.898.413
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEMUDAAN	kegiatan pengembangan kapasitas sang kemudaan	jumlah organisasi kemudaan yang aktif	25 organisasi kemudaan	penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kemudaan terhadap pemuda polopor kab/ kota, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader kab/ kota	Rp	1.388.934.317	Rp	1.408.425.857
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan						Rp	2.431.401.354	Rp	2.038.464.705

APM SD/NI/ paket A
199.431 APK

pendidikan										
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/ paket A, APK SD/MI/ paket A, Angga partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A, angga putus sekolah SD/MI/ Paket A, AM dari SD/MI ke SMP/MTs, APK SMP/MTs/ Paket B, APS SMP/MTs/ Paket B, angga putus sekolah SMP/MTs/ Paket B, angga melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMA/MA, penduduk yang berusia kurang 15 tahun melek huruf (tidak bisa aksara)	APM SD/MI/ paket A, APK SD/MI/ paket A, Angga partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A, angga putus sekolah SD/MI/ Paket A, AM dari SD/MI ke SMP/MTs, APK SMP/MTs/ Paket B, APS SMP/MTs/ Paket B, angga putus sekolah SMP/MTs/ Paket B, angga melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMA/MA, penduduk yang berusia kurang 15 tahun melek huruf (tidak bisa aksara)	SD/MI/ paket A, Angga partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A (99,60), angga putus sekolah SD/MI/ Paket A (0,0023), AM dari SD/MI ke SMP/MTs (99,82), APK SMP/MTs/ Paket B (94,60), APS SMP/MTs/ Paket B (99,48), angga putus sekolah SMP/MTs/ Paket B (0,100), angga melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMA/MA (99,66), penduduk yang berusia kurang 15 tahun melek huruf (tidak bisa aksara) (99,70)	APM SD/MI/ paket A, APK SD/MI/ paket A, Angga partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A, angga putus sekolah SD/MI/ Paket A, AM dari SD/MI ke SMP/MTs, APK SMP/MTs/ Paket B, APS SMP/MTs/ Paket B, angga putus sekolah SMP/MTs/ Paket B, angga melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMA/MA, penduduk yang berusia kurang 15 tahun melek huruf (tidak bisa aksara)	Rp	98.370.743.595	Rp	37.180.671.100	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase guru dengan kualifikasi S1/D-IV, persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik, rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI) dan Menengah (SMP/MTs), rasio guru/ murid rata-rata sekolah dasar (SD/MI) dan Menengah (SMP/MTs) (1:28 dan 1:32)	persentase guru dengan kualifikasi S1/D-IV (3.532), persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (84,27), rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI) dan Menengah (SMP/MTs) (1:20), rasio guru/ murid perkelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI) dan Menengah (SMP/MTs) (1:28 dan 1:32)	persentase guru dengan kualifikasi S1/D-IV, persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik, rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI) dan Menengah (SMP/MTs), rasio guru/ murid perkelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI) dan Menengah (SMP/MTs)	Rp	2.810.008.090	Rp	2.653.848.813	Dinas Pendidikan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	18 kegiatan	meningkatkan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Rp	604.642.146	Rp	340.174.326	Dinas Pariwisata	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	18 kegiatan	meningkatkan pembinaan seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	Rp	142.357.337	Rp	239.311.043	Dinas Pariwisata	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	pengelolaan perpustakaan, penyediaan gemar membaca	jumlah perpustakaan daerah	Menyusunakan target OPD dalam 1 Tahun	Rp	327.953.437	Rp	433.161.365	Dinas Perpustakaan	

Indeks Pendidikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pendataan dan monitoring Arsip yang terklasifikasi	Cakupan Data Arsip yang terklasifikasi	Menyusun target OPD dalam 1 Tahun	Facilitasi dan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Pesterangan Dokumen/Arsip Daerah	Rp	101.051,670	Rp	96.808,537	Dinas Perpustakaan
	7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi	persentase partisipasi politik masyarakat dalam pilkada/pileg/pilpres	100%	Facilitasi pengembangan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pilkada serta pemantauan situasi politik	Rp	941.830,788	Rp	722.396,639	Badan Kesbangpol
	8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kegiatan terkait pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	persentase organisasi yang terdaftar dan terregistrasi di Kota Binjai	100%	Facilitasi perumusan kebijakan teknis dan pemantauan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp	20.389,845	Rp	20.325,278	Badan Kesbangpol
	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kegiatan terkait pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di Pemko Binjai	persentase penanganan konflik berbasis sosial dan budaya	100%	Facilitasi dan monitoring ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terbiasa dan berkembang.	Rp	158.917,885	Rp	173.647,124	Badan Kesbangpol
	10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kegiatan dalam meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat dan ketersediaan konflik sosial	persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi	100%	Meningkatkan kewaspadaan konflik sosial dan pemberantasan penyakit masyarakat	Rp	158.917,885	Rp	158.709,063	Badan Kesbangpol
	11	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	pendidikan dan latihan perkoprasian	jumlah SDM koperasi yang disertifikat	1 tahun	Peningkatan Kualitas Kemampuan Koperasi	Rp	119.993,718	Rp	116.343,688	Dinas Koperasi dan UKM
	12	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	pembinaan sejarah lokal	jumlah dokumentasi sejarah	6 kegiatan	meningkatkan pembinaan sejarah	Rp	150.247,952	Rp	115.622,483	Dinas Pariwisata

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 19 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	Rp	3,016,105,600	Rp	2,947,800,000	BPBD
		20	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	kegiatan pendaftaran penduduk	cakupan pendaftaran penduduk	249	fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk	Rp	705,463,000	Rp	554,753,124	Dinas Catpt
								Rp	31,664,843,336	Rp	28,240,728,188	

WALI KOTA BINJAI

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.A.P